



# SISTEM KEUANGAN DAERAH



Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si



## Sistem Keuangan Daerah

Penyusun: Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si

Penyunting: Aep Syaiful Hamidin  
Penata Sampul: Muhammad Revaldi  
Penata Aksara: Mutiara Amelia Putri

Penerbit:

**MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI**

(ANGGOTA IKAPI)

Bandung—Indonesia

[www.penerbitmanggu.co.id](http://www.penerbitmanggu.co.id)

**2021**

144 hlm.; 17,5 cm × 25 cm

ISBN 978-602-7715-62-7

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam ben-  
tuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana  
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Terbitan oleh Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari

Bandung, 2021



## Daftar Isi

|   |     |
|---|-----|
| Pengantar Penerbit.....   | iii |
| Kata Pengantar.....   | iv  |
| Daftar Isi.....   | v   |
| Bab 1   |     |
| Perkembangan Sistem Desentralisasi.....   | 1   |
| A. Masa Penjajahan.....   | 1   |
| 1. Masa Penjajahan Belanda.....   | 1   |
| 2. Masa Penjajahan Jepang.....  | 2   |
| B. Masa Orde Lama.....  | 3   |
| 1. Masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949).....                                   | 3   |
| 2. Masa Demokrasi Liberal (1950–1959).....                                      | 3   |
| 3. Masa Demokrasi Terpimpin (1960–1965).....                                    | 4   |
| C. Masa Orde Baru & Reformasi.....  | 5   |
| 1. Otonomi Daerah Masa Orde Baru.....   | 5   |
| 2. Otonomi Daerah Masa Reformasi.....   | 5   |
| D. Rangkuman.....   | 8   |
| Bab 2   |     |
| Desentralisasi Fiskal.....  | 9   |
| A. Pengertian.....  | 9   |
| B. Pendapatan Asli Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah...<br>11 |     |
| C. Rangkuman.....   | 13  |
| Bab 3   |     |
| Reformasi Perencanaan Pembangunan Daerah.....                                   | 15  |
| A. Pembahasan.....  | 15  |
| B. Kesimpulan.....  | 22  |



## Daftar Pustaka

- Adrian Sutendi, SH., MH. 2011. *Hukum Pajak*. Bandung: Sinar Grafika.
- Ahmad Yani, S.H., M.M., Ak. tth. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. ttp.: tp.
- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arik Haryono. 2007. *Modul Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara*. Tangerang: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum.
- Bahrullah Akbar. 2002. "Fungsi Manajemen Keuangan." *Boklet Publikasi BPK*. No. 87 Bulan Oktober, Jakarta: BPK.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada.
- Bird, Ricard M dan Francois Vaillancourt. 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Boediono. 2003. *Kebijakan Fisikal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Keterangan Menteri Keuangan tentang Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara. 2007. "Dasar-Dasar Manajemen Aset/Barang Milik Daerah." *Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*.
- Departemen Dalam Negeri Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Devas, Nick, et.al. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.



- Devey, Kenneth. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Alih Bahasa Amrullah, dkk. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Didik J. Rachbini. 2001. *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimock, E. Marshall. tth. *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga.
- W. Riawan Tjandra, Dr., S.H., M.Hum. Hukum Keuangan Negara [Elisa.ugm.ac.id](http://Elisa.ugm.ac.id) (Slide "Hukum Benda Milik Negara");
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://jhohandewangga.wordpress.com>, "Pengertian dan Macam-macam Pajak Daerah, diakses tanggal 25 November 2015.
- <http://www.kajianpustaka.com>. "Defenisi Pajak dan Jenis-jenis Pajak." diakses tanggal 25 November 2013.
- Ichsan, Moch, dkk. 1997. *Administrasi Keuangan Daerah: Pengelolaan dan Penyusunan APBD*. Malang: PT. Danar Wijaya, Brawijaya University Press.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi daerah di Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, C.S.T. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bank Dunia. 2005. "Indonesia Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah Suatu Kerangka Kerja Pengukuran." makalah pada *Workshop A Measurement Framework Public Financial Management*, 28–29 Agustus, Bali.
- M.L Jhingan. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Perss.
- MaCandrews, Colin dan Ichlasul Amal. 1993. *Hubungan Pusat Daerah dalam pembangunan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2002. "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah." makalah pada *Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia*, 7 Mei, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.



- Muhammad Nahdi. 2010. "Era Baru Pengelolaan Kekayaan Negara di Indonesia." *Media Kekayaan Negara*, Edisi 02. 25–27.
- Ndraha, Talizidu. 1988. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nugroho, Riant. D. 2001. "Reinventing Indonesia: Menata Ulang Manajemen Pemerintah untuk membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global." *Makalah*, Jakarta.
- Nugroho, Trilaksono. 2000. "Reformasi dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1 FIA-Unibraw Malang.
- \_\_\_\_\_. 2002. "Administrasi Keuangan Daerah." *Diktat Kuliah*. Malang: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Public Institute Dialog.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Public Institute Dialog.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Rodee, Clyner Carlton. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sidik, Machfud, dkk. 2002. *Dana Alokasi Umum-Konsep Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta Penerbit Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Tambunan, B.S. 1996. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Bina Rana Prawira.



Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

[www.mandikdasmen.depdiknas.go.id](http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id) (Slide "Pelaporan Barang Milik Negara Atas Dana Dekonsentrasi").





### **Etnografi Suku Bangsa Minangkabau**

Penulis : Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si.

ISBN : 978-602-5717-84-0

Ukuran : 20,5 cm x 14,5 cm

Hal : 194 halaman

Harga : Rp.86.100.-



### **Sastra Tutar Sumatera Selatan**

Penulis : Fadhilah Hidayatullah, M.Pd.

ISBN : 978-602-5717-79-6

Ukuran : 20,5 cm x 14,5 cm

Hal : 102 halaman

Harga : Rp.45.000.-



### **Bahasa Indonesia**

Penulis : Dr. Iswanto, M.Hum

ISBN : 978-602-5717-72-7

Ukuran : 20,5 cm x 14,5 cm

Hal : 219 halaman

Harga : Rp.63.500.-